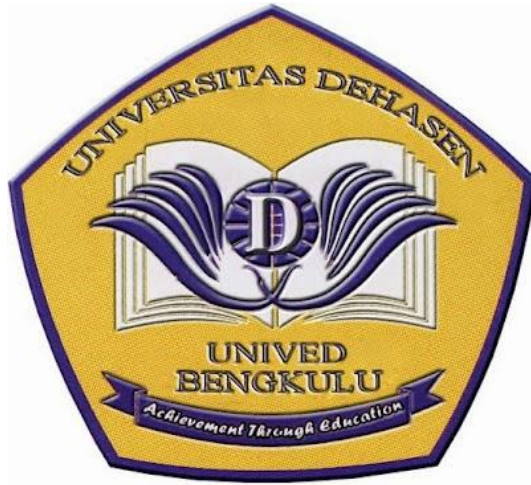


**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Pada Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

OLEH :

NONI LESTARI

NPM: 18040179P

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DEHASEN
BENGKULU
2023**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

SKRIPSI

Oleh :

NONI LESTARI
NPM : 18040179P

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. E. AHMAD SOLEH, S.E., M.Si
NIDN. 0201128101



SUSWATI NASUTION, S.E., M.Si
NIDN. 0222057505

Bengkulu, Juni 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

SKRIPSI

**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

SKRIPSI

Oleh :

NONI LESTARI

NPM : 18040179P

*Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 12 Juni 2023
Dan Dinyatakan Lulus*

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. E. AHMAD SOLEH, S.E., M.Si
NIDN. 0201128101

Anggota,

SUSWATI NASUTION, S.E., M.Si.
NIDN. 0222057505

Anggota,

ISWIDANA UTAMA PUTRA, S.E., M.M
NIDN. 0211018503

IDA AYU MADE ERMEYTHA GAYATRI, S.E., M.M
NIDN. 0231058501

Bengkulu, Juni 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

Dr. SUWARNI, S.Kom., M.M
NIDN. 0211047001

MOTTO :

- ✚ *Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya*

PERSEMBAHAN

- ✚ Tuhanku yang Maha Esa Allah SWT yang telah meridhoi setiap langkah dan memperlancar disetiap langkahku, setiap proses ini takkan berjalan sempurna tanpa ridho darinya
- ✚ Ayahku Herdi Yoza Putra dan Ibuku Susi Yanti yang sangat aku sayangi terima kasih telah membimbing dan membesarkan aku hingga bisa menjadi sosok perempuan yang tegar dan kuat dalam menjalani semua ini. Terima kasih telah mensupport baik materi maupun moril yang luar biasa tanpa lelah dan mengeluh. Doamu selalu menyertaiku.
- ✚ Adikku Tarisa Yolanda yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini
- ✚ Teman-teman seperjuangan S1 Manajemen Ekonomi Angkatan Tahun 2018/2019 yang telah banyak memberikan motivasi baik susah maupun senang
- ✚ Universitas Dehasen yang telah mengantarkan aku untuk ke tahap ini.

ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AT COMMUNICATION AND INFORMATICS DEPARTMENT IN BENGKULU SELATAN DISTRICT

By

Noni Lestari¹⁾

Ahmad Soleh and Suswati Nasution²⁾

ABSTRACTK

The performance of government agencies is now in the spotlight with increasing public awareness of the implementation of public administration. Society often views public sector organizations as nests of inefficiency, waste, sources of leakage of funds and institutions that always lose money. The purpose of this study was to determine the financial performance of the Communication and Informatics Service in South Bengkulu Regency.

This study uses a quantitative research approach, collecting data using secondary data search, data analysis. The results of this study indicate that the financial performance of the South Bengkulu District Communication and Informatics Service for 2018-2022 based on the degree of decentralization ratio is in the very low category. Then based on the regional financial dependency ratio, experiencing a low level of dependence on the central government in providing transfer funds. Based on the ratio of regional financial independence, experiencing a very low level of independence. Based on the compatibility ratio, namely the ratio of regional financial operating expenditures, experienced a fairly low portion of operating expenditures due to the lack of revenue from the South Bengkulu Regency Communication and Informatics Office.

Keywords: Performance, Finance

- 1) Candidate for Bachelor of Management
- 2) Supervisor

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Oleh

Noni Lestari¹⁾

RINGKASAN

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif, pengumpulan data menggunakan pencarian data sekunder, analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018-2022 berdasarkan rasio derajat desentralisasi masuk katagori sangat rendah. Kemudian berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah, mengalami tingkat ketergantungan di katagori rendah dari pemerintah pusat dalam pemberian dana transfer. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, mengalami tingkat kemandirian yang sangat kurang. Berdasarkan rasio keserasian yaitu rasio belanja operasi keuangan daerah, mengalami porsi belanja operasi yang cukup rendah disebabkan oleh kurangnya pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kata Kunci : Kinerja, Keuangan

- 1) Calon Sarjana Manajemen
- 2) Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Bengkulu Selatan” ini dengan baik.

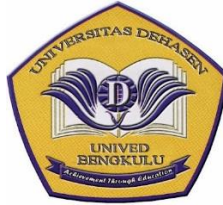
Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, kepada :

1. Ibu Dr. Suwarni, S.Kom. M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
2. Bapak Dr.E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen dan selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
3. Ibu Suswati Nasution, S.E., M.SI. Selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Selatan yang telah memberikan dukungan moril maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.
6. Rekan-rekan Mahasiswa dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat bermanfaat untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Skripsi dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bengkulu, Mei 2023

Penulis,



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTA EKONOMI UNIVERSITAS DEHAASEN BENGKULU**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Noni Lestari
NPM : 18040179P
Program Studi : Ekonomi Manajemen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Dehasen Bengkulu, atau dengan kata lain skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau orang lain.
2. Apabila skripsi saya terbukti ketidaksiannya, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Dehasen Bengkulu.
3. Apabila kelak dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Dehasen Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2023
Menyatakan

NONI LESTARI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL LENGKAP	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Analisis Kinerja.....	7
2.1.1 Pengertian Kinerja.....	7
2.1.2 Indikator Kinerja.....	12
2.1.3 Pengertian Keuangan.....	12
2.1.4 Pengertian Kinerja Keuangan.....	14
2.1.5 Penilaian Kinerja Keuangan.....	15
2.1.6 Tujuan Pengukur Kinerja Keuangan.....	17
2.1.7 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
2.1.8 Indikator analisis kinerja keuangan.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26

2.3 Kerangka Analisis.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
3.2 Definisi Oprasional	30
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.4.1 Alat pengumpulan Data.....	31
3.4.2 Jadwal dan Lokasi Penelitian	32
3.4 Metode Analisis	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Komunikasi dan Informatika.....	34
4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	35
4.1.3 Rasio Desentralisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	36
4.1.4 Rasio Ketergantungan Dinas Komunikasi dan Informatika	41
4.1.5 Rasio Kemandirian Dinas Komunikasi dan Informatika	42
4.1.6 Rasio Keserasian Dinas Komunikasi dan Informatika	43
4.1.7 Rasio Efisiensi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika....	45
4.2 Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Analisis	27
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Realisasi Anggaran APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2022.....	4
Tabel 2. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fisikal	20
Tabel 3. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	22
Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	25
Tabel 5. Rasio Drajat Desentralisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018-2022	41
Tabel 6. Rasio Ketergantungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018-2022	42
Tabel 7. Rasio Kemandirian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018-2022	43
Tabel 8. Rasio Belanja Operasi	44
Tabel 9. Rasio Belanja Modal	45
Tabel 10. Rasio Efisiensi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan	46

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Surat Izin Penelitian dari Universitas Dehasen |
| Lampiran 2 | Surat Izin Penelitian dari Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Lampiran 3 | Surat Selesai Penelitian dari Dinas Komunikasi dan Informatika |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugikan, Dian (2011: 1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah menjadi tonggak dimulainya Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan, Indra dan Gatot (2013: 1). Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat.

Setiap daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sony, 2015: 50). Termasuk pada pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota diurus dan diatur sepenuhnya pada Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu,

dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel yang salah satunya bisa diukur dengan *value for money*. *Value for money* bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, bertujuan supaya pelayanan yang dibelikan sesuai dengan target, dapat meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik agar pemborosan hilang dan terjadi penghematan dalam penggunaan input, alokasi belanja yang lebih mengutamakan kepentingan publik, dan meningkatnya kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Dengan demikian, diperlukan pengukuran menggunakan *value for money*. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, Mardiasmo (2009: 127).

Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Ekonomi merupakan praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluran yang dihasilkan merupakan menggambarkan indikator efisiensi. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*spending wisely*). Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi, Mardiasmo (2009: 132).

Kinerja merupakan gambaran mengenai suatu tingkat untuk mencapai kegiatan, program, kebijakan tertentu dengan tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi yang ada dalam strategi perencanaan organisasi tersebut. Kinerja keuangan organisasi sektor publik dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu organisasi pemerintah, dalam setiap tahunnya memiliki program/kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan kinerjanya. Berikut ini diketahui realisasi program/kegiatan PAPBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Anggaran APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 – 2022

No	Program	Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%
2	Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	62%	63,5%	65,38%	65,4%	60%
3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	7,1%	7,2%	7,3%	7,2%	7,3%
4	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	42%	43%	35,6%	60%	61%
5	Tingkat keamanan informasi pemerintah	52%	60,2%	60%	100%	56%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2018 – 2022 mengalami penurunan dan peningkatan pada setiap program. Menurut Mardiasmo pengertian ekonomi adalah pembelian barang atau jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik. Apabila terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar.

Selain itu, selama 5 tahun ini (2018 – 2022) terdapat program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Proses kegiatan operasional dapat dinyatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Bengkulu Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Keuangan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Bengkulu Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan dalam mempelajari tentang Kinerja Keuangan dan sebagai bahan pelajaran bagi Akademi khususnya mahasiswa dalam melengkapi referensinya.

2. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan masukan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan instansi/ perusahaan dimasa yang sekarang maupun yang akan datang, serta informasi yang dihasilkan dapat di implementasikan dalam

kinerja keuangan untuk meningkatkan pemahaman peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan berdasarkan kenyataan dilapangan.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan dapat menambah pustaka dalam ilmu ekonomi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Kinerja Keuangan dan dapat juga dikembangkan dengan variabel- variabel yang lain.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah lebih terarah maka penulis memberikan batasan pada penelitian ini. Penelitian ini difokuskan kepada analisis kinerja keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2022.

Untuk kita memfokuskan pembahasan dan kejelasan data yang akan dibahas agar sistematis dan tidak menyimpang, maka pembahasan ini perlu dibatasi pada kinerja keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Analisis Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, selalu digerakan oleh sekelompok orang yang berperan aktif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tentunya tidak akan tercapai jika kinerja anggota atau pegawainya tidak maksimal.

Menurut Mangkunegara (2016: 67), kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Tidak jauh berbeda Umar (2015: 227) mendefinisikan kinerja sebagai suatu keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan yang secara rasio lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang dicapai.

Robbins (2015: 176) lebih cenderung menggunakan kata *performance* dalam menyebut kata kinerja. Menurutnya *performance* atau kinerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Berbagai pendapat di atas dapat menggambarkan bahwa kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai adalah penilaian hasil kerja seseorang dalam suatu organisasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Sutrisno (2016: 181) beberapa hal yang digunakan untuk menilai kinerja disebutkan antara lain :

- a) Keterampilan merencanakan, meliputi : menilai dan menetapkan prioritas dari bidang hasil, merancang rencana jangka panjang dan pendek yang realistis, merumuskan jadwal yang mungkin, mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dan hambatan-hambatan ke arah pencapaian hasil yang dituntut.
- b) Keterampilan mengorganisasi, meliputi: mengelompokkan kegiatan demi penggunaan optimal atas sumber-sumber personel dalam rangka mencapai tujuan, secara jelas mendefinisikan tanggung jawab dan batas wewenang bawahan dan meminimalkan kebingungan dan ketidakefisienan dalam operasi kerja.
- c) Keterampilan mengarahkan, meliputi: kemampuan untuk memandu

dan menekankan proses motivasi, komunikasi dan kepemimpinan.

- d) Keterampilan mengendali, meliputi : menetapkan prosedur yang tepat untuk terinformasi tentang kemajuan kerja bawahan, mengidentifikasi simpangan dalam kemajuan tujuan kerja dan menyesuaikan diri dalam kerja untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan telah dicapai.
- e) Menganalisis masalah meliputi: menetapkan dana yang berhubungan dengan permasalahan, membedakan fakta-fakta yang berarti dari yang kurang berarti, menetapkan hubungan timbal balik dan mencapai pemecahan yang kelihatannya praktis.

Terdapat berbagai teori mengenai indikator kinerja pegawai. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai Fadel, (2014: 195) yaitu :

a. Pemahaman atas tupoksi

Dalam menjalankan tupoksi, bawahan harus terlebih dahulu paham tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Inovasi

inovasi yang positif dan menyampaikan pada atasan serta mendiskusikannya pada rekan kerja tentang pekerjaan.

c. Kecepatan kerja

Dalam menjalankan tugas kecepatan kerja harus diperhatikan dengan menggunakan mengikuti metode kerja yang ada.

d. Keakuratan kerja

Tidak hanya cepat menyelesaikan tugasnya, namun tugas pegawai juga harus disiplin dalam mengerjakan tugas dengan teliti dalam bekerja dan melakukan pengecekan ulang.

e. Kerjasama

Kemampuan dalam bekerjasama dengan rekan kerja lainnya seperti bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain.

Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja individu ini akan tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya kerja (*work effort*) dan dukungan organisasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu :

a. Faktor kemampuan

Perlu penempatan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya

b. Faktor motivasi

Kondisi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan. Organisasi(tujuan kerja) yang merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri karyawan untuk melakukan kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji, (Mangkunegara, 2016: 67-68). Menurut steers dalam buku Edi sutrisno (2012: 151) umumnya

orang percaya bahwa prestasi kerja individu merupakan fungsi gabungan dari tiga faktor, yaitu :

1. Kemampuan, perangai, dan minat seorang pekerja.
2. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seseorang dalam bekerja.
3. Tingkat motivasi kerja.

Adapun indikator kinerja karyawan menurut Lazer dalam Sigit Prastyo (2014: 58):

- 1) Kemampuan teknis
 - a) Ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan.
 - a) Kemampuan menggunakan metode.
 - b) Teknik kerja yang di gunakan karyawan.
 - c) Peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas.
 - d) Pengalaman yang pernah dialami karyawan dengan pekerjaan yang sejenis
 - e) Pelatihan yang diperoleh karyawan.
- 2) Kemampuan konseptual
 - a) Kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan.
 - b) Penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh.
 - c) Tanggung jawab sebagai seorang karyawan.
- 3) Kemampuan hubungan interpersonal
 - a) Kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain.
 - b) Memotivasi karyawan.
 - c) Melakukan negosiasi.

d) Pekerjaan yang dihasilkan karyawan.

2.1.2 Indikator Kinerja

Adapun indikator kinerja menurut Lazer dalam Sigit Prastyo (2014: 58):

- 1) Kemampuan teknis
 - a) Ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan.
 - f) Kemampuan menggunakan metode.
 - g) Teknik kerja yang di gunakan karyawan.
 - h) Peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas.
 - i) Pengalaman yang pernah dialami karyawan dengan pekerjaan yang sejenis
 - j) Pelatihan yang diperoleh karyawan.
- 2) Kemampuan konseptual
 - a) Kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan.
 - d) Penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh.
 - e) Tanggung jawab sebagai seorang karyawan.
- 3) Kemampuan hubungan interpersonal
 - e) Kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain.
 - f) Memotivasi karyawan.
 - g) Melakukan negosiasi.
 - h) Pekerjaan yang dihasilkan karyawan.

2.1.3 Pengertian Keuangan

Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Istilah dapat berarti, Ilmu keuangan dan asset lainnya, Manajemen asset tersebut, Menghitung dan mengatur risiko proyek, Ridwan dan Inge (2013: 97).

Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrument yang terlibat dalam transferuang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Keuangan juga bisa didefinisikan sebagai manajemen keuangan, yaitu segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Manajemen keuangan merupakan hal yang penting untuk diterapkan pada perusahaan. Hal ini dikarenakan, keuangan merupakan salah satu pondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan (Guruakuntansi.com). Menurut (Guruakuntansi.com) ada 3 ruang lingkup manajemen keuangan:

1. Keputusan Pendanaan Keputusan pendanaan mencakup segala kebijakan manajemen yang berhubungan dengan cara memperoleh dana perusahaan. Misalnya, kebijakan perusahaan untuk menerbitkan surat berhargaseperti obligasi, serta kebijakan utang angka pendek dan panjang. Dana tersebut bias berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.

2. Keputusan Investasi Keputusan investasi meliputi segala yang berkaitan dengan kebijakan penanaman modal perusahaan seperti aktiva tetap (fixed asset). Seperti gedung, tanah, dan mesin. Investasi juga bias dalam bentuk aktiva financial berupa surat-surat berharga yaitu, Obligasi dan saham
3. Keputusan Pengelolaan Asset Keputusan pengelolaan asset meliputi, kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan asset yang dimiliki secara efisien. Hal tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.1.4 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dalam konteks dunia usaha mengandung pengertian yang sangat luas. Pengertian kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas, Jumingan (2016: 239).

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan

benar, Fahmi (2012: 2). Menurut Rudianto (2013: 189) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Menurut Mulyadi (2014: 2) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya”. Pendapat serupa dikemukakan oleh Sawir (2015: 1) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan. Menurut Wiratna (2017: 71) menyatakan bahwa Kinerja keuangan merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu dilakukan penilaian/pengukuran secara periodik.

Dari sejumlah pengertian kinerja keuangan di atas, dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

2.1.5 Penilaian Kinerja Keuangan

Menurut Sri Miniarti (2011: 34) penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Pengukuran kinerja diaplikasikan perusahaan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan operasionalnya supaya bisa bersaing dengan perusahaan lain.

Untuk investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melihat perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.

3. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
4. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

2.1.6 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk diketahui karena pengukuran yang dilakukan dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan tergantung pada sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis. Karena alasan itu, pihak manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi perusahaan dengan alat ukur penilaian kinerja yang akan digunakan serta tujuan pengukuran kinerja keuangan tersebut. Ada empat tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan, Munawir (2014: 31) yakni untuk:

1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
4. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil.

Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya. Dengan tujuan tersebut, penilaian kinerja keuangan mempunyai beberapa peranan bagi perusahaan. Penilaian kinerja keuangan dapat mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan, untuk menentukan atau mengukur efisiensi setiap bagian, proses atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, untuk menilai dan mengukur hasil kerja pada tiap-tiap bagian individu yang telah diberikan wewenang dan tanggungjawab, serta untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik, Wild dan Halsey (2005: 20).

Rasio Keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan (berarti). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu Cara untuk menilai kinerja perusahaan di masa lalu dan masa sekarang, Harahap (2011: 297). Rasio keuangan digunakan untuk melihat prospek dan risiko perusahaan pada masa

yang mendatang. Faktir prospek dalam rasio tersebut Akan memperngaruhi harapan investor terhadap perusahaan pada masa-masa mendatang, Hanafi (2016: 75).

2.1.7 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya, Abdul Halim (2012: 231). Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah, Abdul Halim (2012: 232) adalah :

- 1) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- 2) Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

2.1.8 Indikator Kinerja Keuangan

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa indikator Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal. %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik

> 50,00	Sangat baik
---------	-------------

Sumber : Anita (2011 : 22)

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = x \ 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain

(Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman, Widodo (2017: 262). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Transfer}}{\text{Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif

Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007, hlm169).

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Rasio

Keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut, Abdul Halim (2012: 234):

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = x \ 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = x \ 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

e. Rasio Efisiensi Belanja Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Belanja Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh

pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya, Abdul Halim (2012: 236). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = x \ 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2012: 23)

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Suprotul Azwa Marpaung (2015) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu dengan judul “*Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) muamalat Harkat Sukaraja*” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja

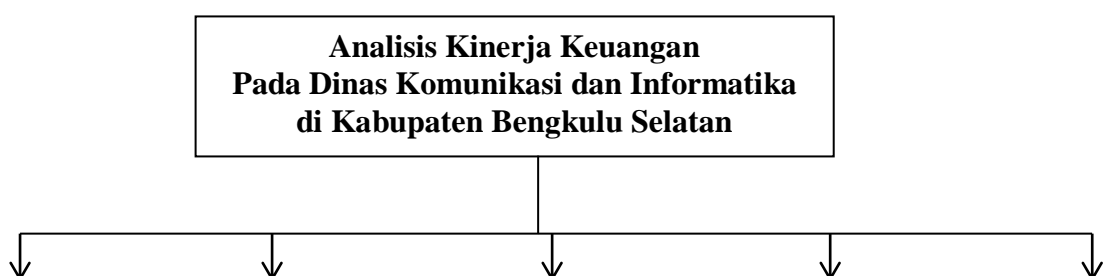
keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja. Sedangkan analisis dengan menggunakan metode kuantitatif menggunakan rasio keuangan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja dari sisi likuiditas (rasio LDR) pada tahun 2013 sebesar 143,82% tidak sehat dan pada tahun 2014 sebesar 99,73% meningkat menjadi sehat. Dari sisi solvabilitas (rasio CAR) sehat, yaitu tahun 2013 sebesar 14,49% dan 2014 sebesar 12,72%. Sedangkan dari sisi rentabilitas kinerja keuangan bank sehat baik rasio ROA maupun BOPO. Rasio ROA tahun 2013 sebesar 4,34% dan tahun 2014 sebesar 2,58%. Nilai rasio BOPO tahun 2013 sebesar 51,43% dan tahun 2014 sebesar 58,29%, karena mampu memanfaatkan aset yang ada untuk memperoleh laba maksimal dan melakukan efisiensi biaya dengan baik.

2. Nur Zeni Amilia Putri (2020) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Surabaya dengan judul "*Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada program kesehatan masyarakat dan program perbaikan gizi masyarakat tahun 2016 dan 2017 sudah sangat baik, kecuali pada program kefarmasian, alat kesehatan, dan pengamanan makanan yang dikategorikan baik. Pada tahun 2018 hanya program perbaikan gizi yang sangat baik dan penggunaan anggaran dari tahun 2016 – 2018 dinyatakan efisien.

3. Ika Nurhayati Putri (2018) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi masuk katagori sangat rendah, rasio ketergantungan berada di tingkat katagori sedang, rasio kemandirian keuangan daerah, mengalami tingkat kemandirian yang sangat kurang, rasio keserasian yaitu rasio belanja operasi keuangan daerah, mengalami porsi belanja operasi yang cukup tinggi, rasio keserasian yaitu rasio belanja modal keuangan daerah, mengalami penurunan dan posri belanja modal yang cukup kecil, dan rasio efisiensi belanja kurang efisien.

2.3 Kerangka Analisis

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari Bengkulu Selatankaian teori yang tertuang dalam tujuan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari Bengkulu Selatankaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kuantitatif, atau bahkan gabungan keduanya. Adapun kerangka analisis dalam penelitian ini yaitu, Abdul Halim (2012: 232) :





Gambar 1. Kerangka Analisis

Keterangan :

1. Rasio Derajat Desentralisasi : yaitu dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah, Anita (2011 : 22).
2. Rasio Ketergantungan : adalah Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi.
3. Rasio Kemandirian : yaitu menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, Widodo (2017: 262).
4. Rasio Keserasian : menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja

Operasi dan Belanja Modal secara optimal,
Abdul Halim (2012: 234)

5. Rasio Efisiensi Belanja : menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil (2012: 236).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi pada sample tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statisistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan, Arikunto, (2014: 174).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu peneliti yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Menurut sudut tujuan bidangnya penelitian ini masuk dalam katagori penelitian ekonomi.

3.2 Definisi Operasional

1. Rasio Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Selatan.
2. Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*depencency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya

penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun) di Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Selatan.

3. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Selatan.
4. Rasio keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dana belanja rutin dan belanja modal secara optimal di Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Selatan.
5. Rasio efisien belanja adalah “organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan” di Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu Selatan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu :

Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022 yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Data dan dokumen yang di perlukan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022.

Alat pengolahan data menggunakan metode analisis data, untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 sampai 2022, maka dilakukan pengujian berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja untuk mengukur tingkat kinerja keuangan.

3.3.2 Jadwal dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2023 dimulai dari observasi awal yang dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan selesai. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.4 Metode Analisis

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat dinformasikan kepada orang lain, Sugyono, (2012, hlm 334).

Teknik pengolahan data menggunakan metode analisis data, untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dilakukan pengujian berdasarkan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal) dan rasio efisiensi belanja untuk mengukur tingkat kinerja keuangan, adapun rumusnya sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Rasio Derajat Desentralisasi = $\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$
2. Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan = $\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$
3. Rasio Kemandirian Rasio Kemandirian = $\frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$
4. Rasio Keserasian
 - a. Rasio Belanja Operasi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
 - b. Rasio Belanja Modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
5. Rasio Efisiensi Belanja Rasio Efisiensi Belanja = $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$